



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SUKABUMI**



# **RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022**

## Kata Pengantar

---

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2022, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran, indikator Kerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2022, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana Kerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat menghasilkan Kerja yang efektif dan efisien.

Sukabumi, 5 Januari 2022  
Kepala,



**USMAN JAELANI, SH., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641207 199503 1 001

# Daftar Isi

---

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
<b>Bab II Rencana Strategis</b> .....	8
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 .....	7
2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 .....	10
<b>Bab III Penutup</b> .....	30

# Bab I Pendahuluan

---

## 1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2022, maka disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target Kerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan kegiatannya.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas Kerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi kepada Bupati.

## 1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi;

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi Disnakertrans Kabupaten Sukabumi :

Sesuai tugas pokoknya maka Disnakertrans Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang hubungan industrial, bidang transmigrasi; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. Penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;



- e. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
- f. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tugas Disnakertrans sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana diamanatkan juga dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kepala Disnakertrans dalam hal ini bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Disnakertrans selalu berupaya untuk terus meningkatkan Kinerjanya sebagai lembaga Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, Disnakertrans memprioritaskan pada Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis Kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.

## Bab II Rencana Strategis

---

### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang diharapkan, adapun Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi, yaitu:

***"Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religious, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin"***

dengan **Misi** sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel.

### Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program

#### A. Tujuan

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Sukabumi. Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah yaitu,

**“ Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius “.**

## **B. Sasaran**

Sasaran adalah hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 2) Meningkatnya jumlah transmigrant yang terfasilitasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Disnakertrans Kabupaten Sukabumi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5					
<b>Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius</b>	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70	55-70
	Meningkatnya jumlah transmigrant yang terfasilitasi	Persentase Jumlah Transmigran yang Terlatih	%	16,6	16,6	20	20,4	21,2	21,8

## **2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**

Rencana Kerja Tahunan Disnakertrans Tahun 2022 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2022.

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Disnakertrans Tahun 2021 dengan memperhatikan pencapaian tahun 2021 terutama triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat). Disamping itu, Rencana Kerja Tahunan ini juga perlu memperhatikan dokumen RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 serta kebijakan daerah akibat adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi disajikan dalam Tabel 2.2 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.2  
RENCANA KERJA TAHUNAN  
TAHUN 2022

Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket
Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	55-70	Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	92	Penyusunan Rencana Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Rupiah Orang Bulan  Dokumen  %	20.972.500 6 12  1  92	
				Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Peserta Pendampingan Disabilitas Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang ditempatkan <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
									Perluasan Kesempatan Kerja	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Tenaga Kerja Rabat Beton	Rupiah Orang Bulan  Orang	482.080.450 6 8  176	

Sasaran Strategis				Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket		
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
												Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mandiri Pengolahan Hasil Pertanian	Orang	20		
												<b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	28		
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	%	28	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah aplikasi vana dipelihara <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Rupiah Orang Bulan  Unit  %	300.000.000 6 3 1 28		
												Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			6.794.000 6 12 20	
												<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Peserta sosialisasi IPK Online	Rupiah Orang Bulan  Orang			

Sasaran Strategis				Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket			
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
													<b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%		28	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KER
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	%	28	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Rupiah Orang Bulan		<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (Meninggal, Sakit, Kasus) <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		Orang	43.000.000 5 12 20		
										%				%		28	



Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
												Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Peserta Diseminasi Peraturan Tata Cara Kerja ke Luar Negeri <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Rupiah Orang Bulan  Orang  %	70.500.000 6 10 50  28	
												Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna (yang mengikuti Pembekalan Kesiapan Kerja)	Rupiah Orang Bulan  Orang  %	22.097.500 5 5 16  28	

Sasaran Strategis				Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket	
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Pemberbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	%	28	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Rupiah Orang Bulan  Perusahaan   %	95.982.000 5 11 90   28	
				Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,3	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Peserta Bidang Keahlian Teknik Manufaktur Instiusional <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Rupiah Orang Bulan  Orang   %	110.550.000 6 12 16   2,3	KERJA

Sasaran Strategis				Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	%	2,3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah LPK Swasta / BLK Komunitas yang dibina <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Rupiah Orang Bulan  Lembaga  %	57.668.720 4 9  75   2,3	BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA		
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	%	2,3	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Pengelola UKM Pengolahan Hasil Pertanian yang meningkat kompetensi dan Produktivitasnya <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Rupiah Orang Bulan  Orang  %	63.151.940 4 9  30   2,3			

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS ketenagakerjaan)	%	100	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	100	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	Rupiah Orang Bulan  Perusahaan	5.016.250 5 12 75	
													<b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	
												Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Perusahaan yang mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama  <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Rupiah Orang Bulan  Perusahaan  %	6.417.250 5 12 25  100	
												Penyelenggaraan Pendataan	<b>Input :</b> Jumlah Dana	Rupiah	5.239.000	

Sasaran Strategis				Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket		
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket
								dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				SDM Waktu <b>Output :</b> Profil Ketenagakerjaan <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Orang Bulan  Dokumen  %	512  1  100		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			100	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%		<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Rapat Koordinasi dan Honor, Kajian Kebutuhan Hidup Layak dan Kemampuan Perusahaan)  Fasilitasi Hari Buruh Nasional (persiapan hari buruh nasional,evaluasi hari buruh nasional dan Forum Group Discussion (FGD))  Jumlah Pencegahan Kasus Hubungan Industrial <b>Outcome :</b>	Rupiah Orang Bulan  Orang  			

Sasaran Strategis				Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket		
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
													Dukungan terhadap Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	RANG HUB UN GAN IND UST RIA L DAN SYA RAT KER JA
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								Penyelesaian Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial  <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Rupiah Orang Bulan Kasus	12.985.750 5 12 35 100		
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Asosiasi								Penyelenggaraan Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang terhitung <b>Outcome :</b>	Rupiah Orang Bulan Serikat Pekerja	10.071.200 5 12 50		

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
												Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Dukungan terhadap Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	
												Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Fasilitas LKS Tripartit (Rapat, Honorarium) <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Rupiah Orang Bulan  Orang  %	47.392.250 5 12 27  100	
												Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Perusahaan dan Karyawan yang Memahami Pentingnya Fasilitas Kesejahteraan Pegawai <b>Outcome :</b>	Rupiah Orang Bulan  Orang	5.965.750 5 12 20	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
													Dukungan terhadap Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	
Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah transmigran yang terlatih	%	16,6	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20	Penyuluhan Transmigrasi	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Sosialisasi Informasi Program Transmigrasi (Kecamatan) <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	Rupiah Orang Bulan Kecamatan %	15.531.000 5 9 2 20	BIDANG TRANSMIGRASI
				Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	20	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	20	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah KK Masyarakat Translok yang diterima <b>Outcome :</b> Dukungan terhadap Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	Rupiah Orang Bulan Orang %	27.692.500 5 12 75 20	
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat	%	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian	%	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b>	Rupiah Orang Bulan	2.579.800 6 12	



Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				ta	yang tepat			Daerah	Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	
					sesuai peraturan Perundang-undangan								<b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perubahan <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Rupiah Orang Bulan  Dokumen  %	748.400 6 6 1  100	
												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan <b>Outcome :</b>	Rupiah Orang Bulan  Dokumen	975.600 6 3 1	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket	
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
													Dukungan Pemenuhan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%		100	
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perubahan <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Rupiah Orang Bulan Dokumen  %	873.000 6 3 1  100		
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja <b>Output :</b> Jumlah Laporan Capaian Kinerja <b>Outcome :</b>	Rupiah Orang Bulan Dokumen	8.715.400 6 12 1	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
													Dukungan Pemenuhan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%		100
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi	Rupiah Orang Bulan Dokumen	2.686.000 6 12 2	
													<b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	
					Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai	%	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan	%	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Gaji dan Tunjangan PNS <b>Outcome :</b>	Rupiah Orang Bulan Bulan	7.853.727.955 6 12 12	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					peraturan Perundang-undangan				Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan				Dukungan Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	
												Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Rupiah Orang Bulan  Laporan  %	2.788.000 6 12  12       100	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun <b>Outcome :</b>	Rupiah Orang Bulan  Laporan	1.219.000 6 2  1	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket	
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
													Dukungan Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	SEKRETARIAT	
												Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rupiah Orang Bulan Dokumen	608.000 6 5 1		
													<b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100		

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Rupiah Orang Bulan Laporan	9.544.80061214	100
													<b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%		
												Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rupiah Orang Bulan Laporan	697.000621	100
													<b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%		
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum	%	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum	%	100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu	Rupiah Orang Bulan	14.510.610512	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Pelayanan Perkantoran				Pelayanan Perkantoran				<b>Output :</b> Tersedianya peralatan rumah tangga <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Bulan	12	100
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah ATK yang dibeli Jumlah Makan dan minum yang dibeli <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Rupiah Orang Bulan  Jenis Bulan  %	45.291.332,512  14511  100	
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Fasilitasi barang cetak dan penggandaan <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Rupiah Orang Bulan  Bulan  %	92.322.540,512  12  100	
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu	Rupiah Orang Bulan	14.499.000,512	

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
												SKPD	<b>Output :</b> Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Bulan	4	
													<b>Output :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	
													<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Rupiah Orang Bulan Unit	63.790.000 6 12 5	
													<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Rupiah Orang Bulan	246.000.000 5 12 12	



Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Capaian Program	Satuan	Target	Uraian	Capaian Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara  <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Rupiah Orang Bulan  Unit  %	245.762.000 5 12  6   100	
					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Input :</b> Jumlah Dana SDM Waktu <b>Output :</b> Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang dipelihara  <b>Outcome :</b> Dukungan Pemenuhan Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Rupiah Orang Bulan  Unit  %	170.083.000 6 12  30   100	

## Bab III Penutup

---

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 ini merupakan komitmen Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Kerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana Kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Kabupaten Sukabumi. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disnakertrans Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2022.



Sukabumi, 5 Januari 2022  
Kepala,

**USMAN JAELANI, SH., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641207 199503 1 001